

BAB IV

TEMUAN

4.1 Pengantar

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Lombok Utara menimbulkan dampak berupa kerusakan dan kerugian yang besar bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kriteria penilaian kerusakan dikelompokkan menjadi tiga kategori jenis kerusakan, yaitu rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Untuk memperoleh nilai terhadap dampak bencana dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian yang meliputi lima sektor terdampak bencana yaitu sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor. Masing-masing sektor tersebut masih terbagi menjadi beberapa subsektor sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Sektor, Sub. Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian

No	Sektor	Sub. Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Perumahan• Prasarana Lingkungan
2	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Transportasi (Darat, Laut, Udara)• Sumberdaya Air (SDA) dan Irigasi• Energi/ Listrik• Pos dan Telekomunikasi• Air bersih dan Sanitasi
3	Ekonomi Produktif	<ul style="list-style-type: none">• Pertanian, Perkebunan• Perikanan, Perternakan• UKM, IMKM, IKM, warung, kios, Bumdes• Perdagangan• Koperasi• Pariwisata

4	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan • Budaya, cagar budaya dan Bangunan bersejarah
5	Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Ketertiban dan Keamanan • Perbankan • Lingkungan Hidup • Pengurangan Resiko Bencana

Dari penilaian dan kerusakan tersebut yang kemudian menjadi pedoman untuk pemerintah dalam melakukan rencana pemulihan dari berbagai sektor yang telah ditetapkan.

Undang-undnag Nomor 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjelaskan pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kegiatan yang bersifat segera dilakukan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah selain itu adanya inpres Nomor 5 Tahn 2018 yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya pemulihan. Upaya pemulihan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan. Pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab atau yang telah diberi amanat oleh pemerintah pusat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentu mempunyai upaya pemulihan atau membangun kembali dengan lebih baik dalam rangka mengembalikan Lombok Utara yang hancur akibat gempa bumi dengan skala 7.0 SR pada tahun lalu dengan angka kerugian dari masing masing sektor yang telah di jabarkan dibawah. Sebelum pemerintah

daerah membuat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah daerah bersama BPBD, BPBD Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlebih dahulu melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kajian kebutuhan pemulihan kemanusiaan yang dilanjutkan dengan pengkajian kebutuhan pemulihan kehidupan masyarakat maupun wilayah yang terdampak bencana yang meliputi semua yaitu permukiman, infrastruktur, Ekonomi, Sosial, dan Lintas Sektor yang telah dijelaskan pada awal bab ini. Dan dari hasil perhitungan didapatkan hasil kerusakan dan kerugian pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Rekapitulasi penilaian kerusakan dan kerugian

No	Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Total Kerusakan Dan Kerugian (Rp)
1	Pemukiman	3,505,485,200,000	3,731,409,800,000	7,236,895,000,000
2	Infrastruktur	303,676,794,062	15,943,406,000	319,620,200,062
3	Sosial	1,160,633,995,036	169,893,013,566	1,330,527,008,602
4	Ekonomi	274,310,973,839	428,718,820,000	703,029,793,839
5	Lintas Sektor	235,104,235,250	166,009,017,698	401,113,252,948
TOTAL		5,479,211,198,187	4,511,974,057,264	9,991,185,255,451

Dari tabel di atas angka kerusakan dan kerugian yang di alami oleh pemerintah daerah mencapai 10 Triliun, sebagai Kabupaten baru pemerintah daerah tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, dan dari tabel tersebut sektor pemukiman menjadi kerugian terbesar bagi pemerintah daerah. Dengan angka kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencapai 6 Triliun, dengan komposisi rencana pendanaan dari APBN sebesar 51,04,51% yang terdiri dari

DSP BNPB, Anggaran Kementerian/Lembaga dan Usulan Hibah RR. Dana berasal dari sumber lainnya yaitu dana masyarakat dan dunia usaha sebesar 21,11%, berasal APBD Kabupaten Lombok Utara sebesar 3,44% dan dari APBD Provinsi NTB sebesar 0,35%. untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdapat 5 (lima) indikasi sumber pendanaan yang dapat membiayai kegiatan ini yaitu bersumber dari APBD Kab. Lombok Utara, APBD Prov. NTB, APBN Kementerian/lembaga, Dana Siap Pakai BNPB tahun 2018, usulan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan sumber lainnya yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Berikut sumber pendanaan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel 4.3

Indikasi pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

NO	SEKTOR	Nilai Kebutuhan	Pembiayaan (Rp) 2018 – 2019					
			APBD Lombok Utara	APBD Provinsi NTB	Kementerian/ Lembaga	DSP BNPB	Usulan HIBAH RR	Sumber Lainnya
1	Permukiman	3,182,787,143,000	49,371,350,000	-	157,995,000,000	2,819,170,793,000	156,250,000,000	-
2	Infrastruktur	471,556,296,279	88,351,173,457	7,461,000,000	263,772,442,000	-	109,185,180,821	2,786,500,000
3	Sosial	1,056,558,750,000	22,661,610,000	2,707,766,000	35,888,169,515	38,810,388,227	174,808,336,485	781,682,479,773
4	Ekonomi	499,525,111,400	17,564,311,400	650,000,000	24,551,500,000	-	52,101,800,000	404,657,500,000
5	Lintas Sektor	389,195,154,943	14,821,752,921	8,540,549,590	47,462,696,858	-	318,370,155,575	-
TOTAL		5,599,622,455,621	192,770,197,778	19,359,315,590	529,669,808,373	2,857,981,181,227	810,715,472,881	1,189,126,479,773

Disisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidaklah cukup mendukung dalam hal pemulihan pasca bencana, untuk itu Pemerintah Daerah tentunya membutuhkan semua pihak untuk

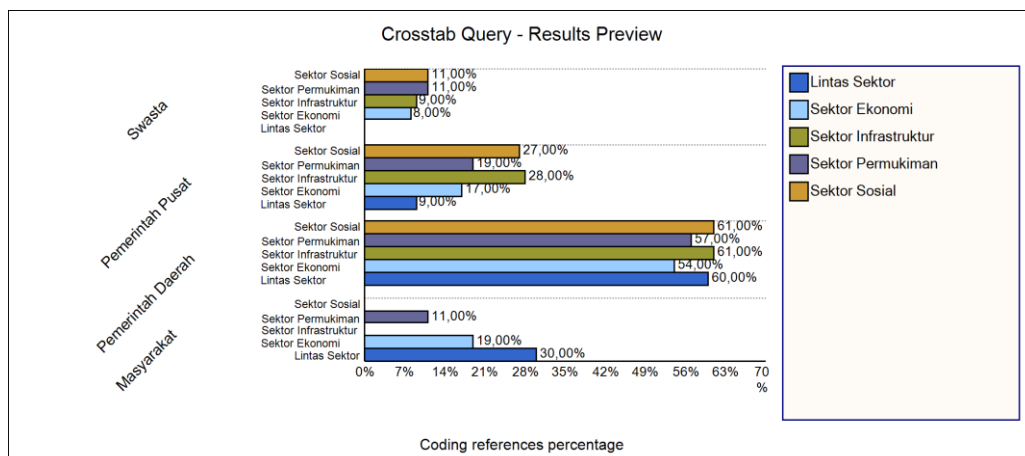
membantu dalam hal pemulihan pasca bencana, hal tersebut terlihat dalam figure yang dihasilkan pada aplikasi Nvivo 12 Plus, Pemerintah Daerah di bantu oleh Pemerintah Pusat, Lembaga Kementerian, Lembaga Non Kementerian serta pihak swasta dan lain-lain.

Pasca bencana pemulihan awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembongkaran dan pembersihan bangunan yang terdampak, meliputi rumah, pertokoan, pasar, perkantoran, fasilitas pelayanan dasar, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya, perbaikan pipa air bersih, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.

4.2 Pemulihan Pasca Gempa Lombok Utara

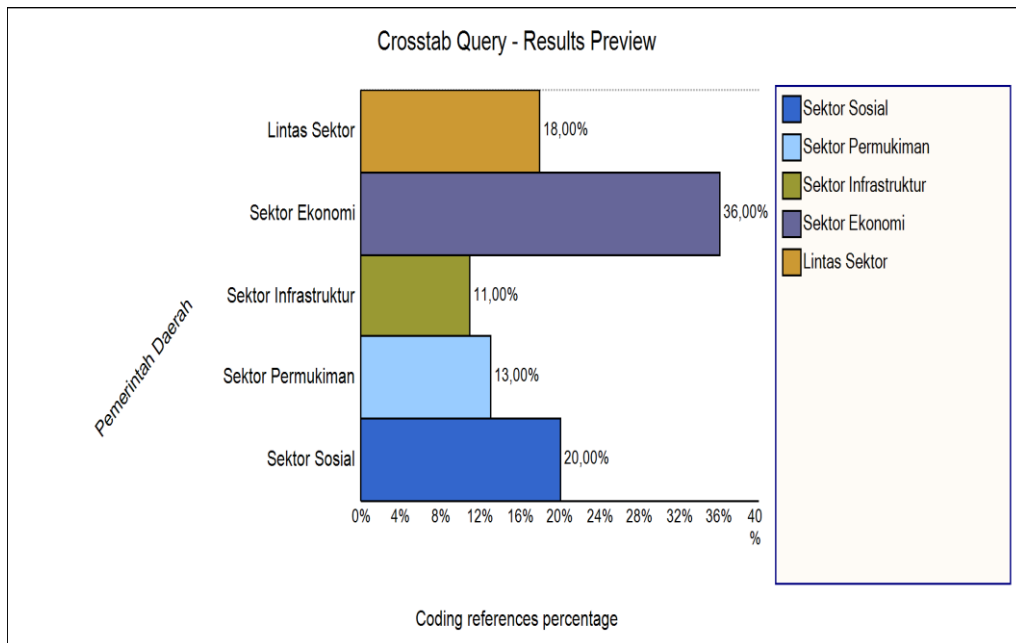
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dilakukan dari berbagai sektor yang telah ditetapkan setelah dilakukannya penilaian kerusakan dan kerugian dari berbagai sektor diantaranya meliputi lintas sektor, ekonomi, infrastruktur, pemukiman serta sektor sosial, pada grafik berikut keterlibatan dari berbagai pihak dalam pemulihan pasca bencana.

Figure 4.1. Keterlibatan pemerintah dan non pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana



Dari figure yang dihasilkan aplikasi Nvivo 12 di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan dari berbagai pihak untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana sangat dibutuhkan, dan dapat dilihat dari figure di atas pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dibandingkan pihak pemerintah atau non pemerintah. Pemerintah daerah tentunya tidak mungkin mampu untuk merespon berbagai aspek dalam upaya respon dan pemulihan bencana secara mandiri, selain lembaga pemerintah sendiri lembaga non pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara, pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara bersama BPBD di koordinasikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD tersebut, Undang-Undang tentang penanggulangan bencana memang mengamankan pemerintah sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemulihan pasca bencana akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki perlu didorong peran dari berbagai pihak dalam membantu pemulihan pasca bencana, berbagai kerjasama pemerintah maupun lembaga non pemerintah/ swasta telah dilakukan sebagai upaya untuk pemulihan kembali kondisi masyarakat seperti sebelum terjadinya bencana. Meskipun adanya dukungan dari pihak non pemerintah tentu pemerintah daerah harus mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap proses pemulihan, berikut grafik dari kegiatan pemulihan pasca bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Figure 4.2. Pemerintah daerah dalam pemulihan berbagai sektor



Meskipun sektor permukiman dan sosial menjadi prioritas utama dalam pemulihan pasca bencana tetapi dari grafik di atas menjelaskan bahwa sektor ekonomi lebih dominan dikarenakan dalam pengolahan data di Nvivo 12 Plus lebih banyak berbicara terkait dengan program yang di upayakan pemerintah bersama lembaga pemerintah lain dan swasta untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat terdampak, sebab sektor ekonomi merupakan bidang yang terpenting untuk penghidupan masyarakat yang akan datang. Menurut (Hadi, 2019) dari pengalaman pemulihan ekonomi pascabencana sebelumnya dari beberapa bencana lain yang telah dilakukan, khususnya setelah gempa Yogyakarta dan letusan Gunung Merapi, bahwa proses dan tahapan pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pemulihan bidang lain, sehingga target pemulihan yang tidak hanya pulih ke kondisi awal dapat tercapai, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunannya

dan meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat lokal dan daerah yang lebih baik, lebih aman dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang untuk itu pemerintah Lombok utara harus memulihkan sektor ekonomi berbasis ketahanan untuk keberlanjutan masyarakat, selain Sektor ekonomi sektor lain juga tidak kalah penting untuk di rekonstruksi kembali pasca terjadinya gempa khususnya di sektor pemukiman, rekonstruksi rumah penduduk juga menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Berikut penjelasan dari berbagai sektor.

4.2.1 Pemulihan Sektor sosial

Sektor sosial merupakan sektor terdampak terbesar setelah pemukiman, kebutuhan terbesar pada sektor sosial terdapat pada sarana keagamaan 67,32%, pendidikan 19,42%, kemudian sarana kesehatan 11,71% dan sarana seni budaya dan cagar budaya 1,56%. Berikut tabel jumlah kerusakan sektor sosial

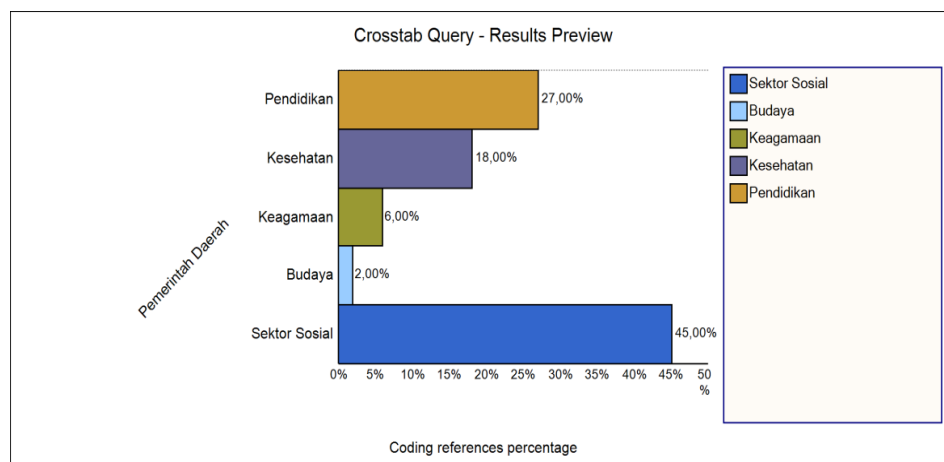
Tabel 4.3 Jumlah kerusakan pada sektor sosial

No	Sub Sektor	Jumlah (Unit)			Total (unit)
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1	Kesehatan				
a	Rumah Sakit	1	-	-	1
b	Puskesmas	8	1	-	9
c	Puskesmas Pembantu	25	7	1	33
d	Poskesdes/Polindes/ Pusyandu	6	2	4	12
2	Pendidikan				
a	Paud/TK	68	4	-	72
b	Sekolah Luar Biasa	1	-	-	1
c	SD	140	11	-	151
d	SLTP	32	3	1	36
e	Madrasah	99	-	-	99
f	SMA/SMK	19	5	1	25

3	Keagamaan				
a	Masjid/Mushalla	657	45	18	720
b	Vihara	33	-	2	35
c	Pura	49		2	51
4	Seni Budaya, Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah				
a	Bangunan dan Peralatan Sanggar Seni	18	-	-	18
b	Cagar Budaya	3	2	11	16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kerusakan terbesar ada pada sarana prasarana bidang keagamaan dan sarana prasarana sekolah, rusaknya sarana pada sektor sosial menyebabkan siswa sekolah tidak dapat bersekolah untuk sementara waktu, pelayanan kesehatan menurun, dan masyarakat tidak dapat menjalankan ibadah ditempat ibadah. Meskipun bidang keagamaan mengalami kerusakan terbesar akan tetapi prioritas pemerintah dalam pemulihan pasca bencana ada pada sektor pendidikan dan kesehatan ini terlihat dari hasil dari pada Nvivo 12 Plus.

Figure 4.3 Pemulihan Sektor Sosial



Dari grafik diatas terlihat bahwa bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam melakukan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi, karena bidang pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan sosial masyarakat. Pemulihan pada sektor sosial dilakukan pada beberapa sub bidang di antaranya pada pendidikan, kesehatan keagamaan serta budaya, prioritas pembangunan pada bidang pendidikan dan kesehatan pemulihan sektor sosial tak hanya melalui pembangunan fisik bangunan tetapi juga pada masyarakatnya seperti pemberian trauma healing kepada masyarakat terdampak bencana khususnya kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta memberikan pelayanan kesehatan, untuk bangunan fisik bidang pendidikan hampir seluruh fasilitas pendidikan di Lombok Utara hancur mulai dari SD, SMP dan SMA serta setingkat lainnya, akibatnya banyak siswa yang tidak bisa belajar disekolahnya masing-masing, mereka menggunakan tenda-tenda darurat untuk mengikuti proses belajar mengajar setelah itu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan pendidikan yang utama adalah melakukan pendataan terkait dengan kerusakan serta melakukan perencanaan pembangunan tentu pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat serta organisasi swasta lainnya, pemerintah melibatkan lembaga atau organisasi lain dalam merekonstruksi gedung sekolah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dana bantuan pendidikan Rp 229 miliar untuk mendukung pemulihan sarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar pascagempa Lombok khususnya di Lombok Utara sebelumnya pemerintah telah

menyediakan tenda darurat untk belajar mengajar di sekolah, sampai saat ini Dinas Dikpora Lombok Utara mengklaim pembangunan gedung sekolah mencapai 70 % dan sisanya masih dalam tahap pengerjaan, untuk mengurangi resiko bencana kedepannya pemerintah daerah haruslah mendesain rekonstruksi gedung sekolah berbasis tahan terhadap gempa. Keterlibatan pihak non pemerintah juga terlihat dari partisipasi untuk pembangunan gedung sementara maupun permanen, salah satunya adalah pemerintah bekerjasama dengan ACT untuk membangun gedung sekolah di beberapa wilayah di Lombok Utara.

Dibidang Kesehatan dampak yang ditimbulkan terlihat dari kerusakan aset bebrapa gedung sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes beserta peralatan dan fasilitas pendukungnya yang mengalami kerusakan bervariasi, dengan adanya kerusakan tersebut pelayanan kesehatan diwilayah terdampak bencana mengalami penurunan fasilitas dan tenaga yang terbatas di bandingkan dengan permintaan pelayanan yang meningkat drastis pasca terjadinya bencana. Pemulihan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada awal masa pemulihan adalah pendirian puskesmas darurat atau sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana, saat ini pemerintah telah mulai membangun puskesmas melalui kementerian kesehatan pemerintah memberi bantuan dana kepada pemerintah daerah, pembangunan yang di prioritaskan pertama adalah Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Utara dikarenakan bangunan yang sudah tak layak pakai akibat bencana gempa, pemerintah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak non pemerintah atau lembaga swasta dalam pembangunan fasilitas kesehatan

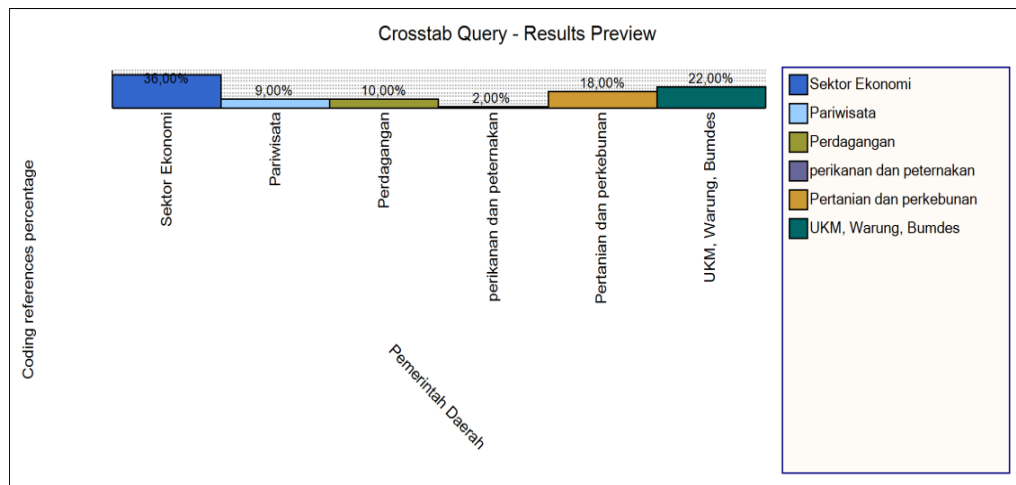
seperti pustu, tidak hanya dari pembangunan fisik saja akan tetapi memberikan pelayanan trauma healing kepada masyarakat terutama kepada anak-anak dengan tujuan memulihkan kondisi psikologis atau trauma pasca terjadinya bencana gempa bumi. Pada aspek keagamaan dampak kerusakan yang ditimbulkan tidak sedikit akibat dari bencana gempa bumi, untuk membangun kembali fasilitas ibadah masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga non pemerintah untuk membangun fasilitas ibadah baik semi permanen ataupun permanen.

4.2.2 Pemulihan Sektor Ekonomi

Perekonomian di Lombok Utara pasca gempa bumi merupakan sektor yang mengalami kerugian cukup signifikan, rusaknya aset dari para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pasar, serta banyaknya fasilitas sarana dan prasarana dari pariwisata yang rusak dll menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil bagi pemerintah dan masyarakat pada saat terjadinya bencana kegiatan ekonomi masyarakat juga mengalami aktifitas yang menurun selama beberapa bulan, disebabkan masyarakat masih mengalami trauma terhadap guncangan gempa yang terjadi, selain itu isu yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan aktifitas ekonomi.

Upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang Sektor Ekonomi meliputi berbagai sub bidang di antaranya UMKM, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, perdagangan, serta pariwisata.

Figure 4.4 Pemulihan Sektor Ekonomi



Dari figure diatas pemulihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), warung serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi prioritas utama dalam pemulihan pasca bencana yang didukung oleh sektor pertanian dan perkebunan, pemulihan kondisi ekonomi masyarakat tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untk kembali kepada kondisi semula. Pada pemulihan tahap awal pembangunan pasar menjadi prioritas pemerintah dalam mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat agar perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dibidang UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan santunan kepada pelaku usaha kecil melalui kementerian, sebanyak 148 orang pedagang usaha kecil yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di lombok utara menerima masing-masing Rp 2 Juta untuk membantu pemulihan kondisi usaha ekonomi. Pada bidang UMKM pemerintah lebih banyak memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan pihak non pemerintah untuk memberi pelatihan kepada pelaku usaha UMKM untk mengelola serta meningkatkan nilai jual atau meningkatkan produktifitas dari

usaha yang dimiliki dengan mengelola sumber daya alam lokal, tidak pemerintah daerah juga berupaya menciptakan Wira Usaha Baru (WUB) bagi masyarakat dengan memberikan peralatan penunjang untuk produksi, dalam melakukan kegiatan tersebut pemerintah perlu dukungan dari semua pihak pemangku kepentingan baik di Provinsi, Pusat dan Organisasi Swasta, pada bidang pertanian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu petani pasca pemulihan bencana dengan melakukan pendistribusian bantuan pupuk, bibit tanaman, alat pertanian dan perkebunan melalui koperasi maupun unit usaha tani, pengadaan pelatihan manajemen lahan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya petani dalam mengolah lahan agar semakin efektif serta pelatihan dan pendampingan usaha pertanian berkelanjutan dengan bekerjasama dengan Koperasi, BUMDES, BUMD, Pemerintah dan Swasta untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan bernilai jual karena menurut (Abraham, 2018) kejadian gempa di Lombok Utara berdasarkan waktu dan data kerugian yang dilaporkan, terjadi pada saat panen, ini yang menyebabkan pada akhirnya hasil dari panen tersebut mengalami kerugian serta penurunan kualitas dan tentu para petani akan lebih fokus untuk bisa membangun kembali rumah mereka yang rusak.

Pada bidang pariwisata pemerintah memberikan bantuan atau dana stimulan untuk perbaikan sarana prasarana desa wisata serta untuk peningkatan ekonomi pelaku usaha di desa wisata selain itu melalui pemerintah pusat pemerintah daerah terus melakukan perbaikan pada fasilitas wisata yang ada di Lombok Utara dikarenakan pemasukan PAD Lombok Utara masuk melalui pariwisata. Pada pemulihan sektor ekonomi masyarakat di tuntut untuk

mengembangkan ekonomi berdasarkan sumber daya potensial yang ada di sekitar, serta pengembangan ekonomi kreatif yang di dasarkan pada kearifan lokal dalam hal ini pemerintah bersama pihak swasta bersinergi dalam membantu masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan akibat gempa.

4.2.3 Sektor Pemukiman

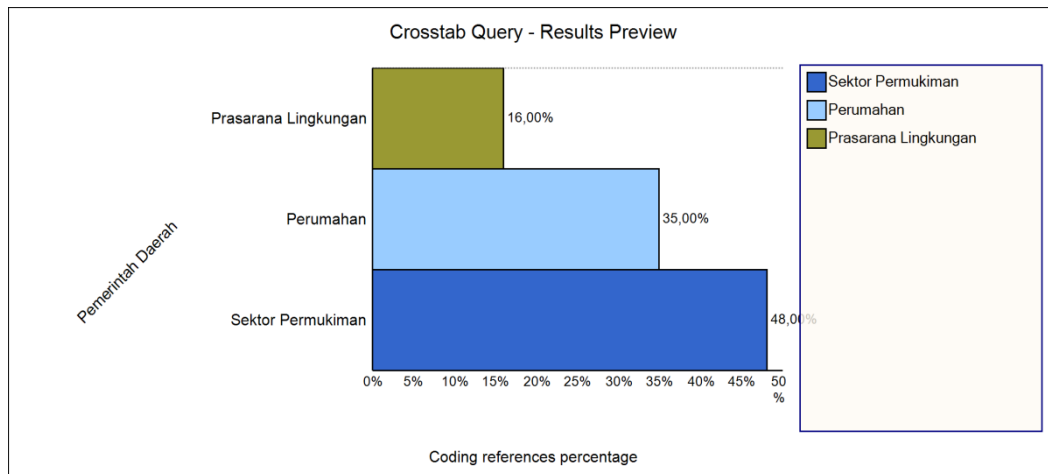
Akibat dari bencana gempa yang melanda Lombok pada tahun lalu sektor perumahan merupakan sektor yang sangat besar dampaknya bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dari data yang ada hampir 50 ribu unit rumah mengalami kerusakan baik rusak berat, sedang maupun ringan, serta rusaknya fasilitas lingkungan.

Tabel 4.5
Jumlah perkiraan kerusakan perumahan dan jumlah yang telah terverifikasi

No	Tingkat Kerusakan	Jumlah Perkiraan (Unit)	Telah Terverifikasi Hingga 15 Oktober 2018 (Unit)
1	Rusak Berat	50,665	44.014
2	Rusak Sedang	9,500	1.758
3	Rusak Ringan	3,167	4.081
Total		63,332	49.853

Kerusakan dan kerugian bangunan rumah menjadi penyumbang terbesar subsektor perumahan yaitu sebesar 97.43%, hal ini sesuai kondisi dilapangan bahwa sebagian besar rumah warga di Kabupaten Lombok Utara dalam keadaan rusak akibat gempa bumi.

Figure 4.5 Pemulihan Sektor Pemukiman



Dari figur di atas pemulihan pada sektor pemukiman 35% di dominasi oleh bidang perumahan, bidang tersebut memang menjadi prioritas awal bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bidang perumahan menjadi penting karena sangatlah penting bagi, kelangsungan hidup masyarakat, pembangunan pemukiman nantinya di kelola dengan skema swakelola berbasis masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong serta pembangunan rumah berbasis tahan terhadap gempa, ada beberapa pilihan yang di tawarkan pemerintah kepada masyarakat seperti risha (rumah instan sederhana sehat), rika (rumah instan kayu) dan riko (rumah instan konvensional). Untuk pemulihan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama kementerian dan pihak non pemerintah atau lembaga swasta adalah membangun rumah sementara kepada masyarakat yang terdampak meskipun tidak semua mendapat bantuan serta masyarakat juga lebih banyak bergerak sendiri untuk membuat rumah sementara sebagai tempat

tinggal. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyediakan dana rekonstruksi sekitar Rp50 juta per keluarga untuk mereka yang menderita kerusakan perumahan berat 25 juta per keluarga untuk mereka yang menderita kerusakan perumahan sedang dan Rp10 juta per keluarga untuk mereka yang menderita kerusakan perumahan ringan. tapi pada sampai saat rekonstruksi rumah masih menjadi permasalahan pemerintah bersama masyarakat di daerah, banyak masyarakat belum menerima haknya untuk bantuan rekonstruksi rumah tersebut, permasalahan terbesar pada pembangunan RTG tersebut ada pada proses birokrasi yang berbelit, mulai dari persoalan penerima, pokmas, nama ganda penerima, belum lagi persoalan fasilitator yang kurang, bahan bangunan yang langka SDM tukang yang minim dan masih banyak lagi. Untuk pembiayaan sektor pemukiman perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 3.182.787.143.000, dengan rencana pendanaan kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sub sektor perumahan sebesar Rp. 2.996.887.143.000, atau 94,16% dan sebesar Rp. 185.900.000.000 atau 5,84% untuk sub sektor prasarana lingkungan. Seluruh anggaran rehabilitasi sektor permukiman bersumber dari APBN melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan anggaran sub sektor prasarana lingkungan rencananya bersumber dari APBD kab. Lombok Utara dan APBN Kementerian/Lembaga.

Gambar 4.1 Contoh Rumah Risha dan Rumah Riko



Pada pelaksanaan pemulihan pasca bencana gempa bumi yang terjadi di NTB khususnya Lombok Utara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun lembaga-lembaga non pemerintah pun banyak terlibat. keterlibatan lembaga non pemerintah ditunjukkan sejak fase tanggap darurat hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi, salah satu lembaga non pemerintah yang bekerjasama dengan pemerintah dalam penanggulangan pasca bencana adalah lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), bentuk kerjasama yang dilakukan ditunjukkan dengan penyediaan posko-posko pengungsian serta membuat

pemukiman sementara untuk para korban bencana tak hanya itu ACT juga membangun WC Umum di beberapa tempat khususnya tempat yang jauh dari jangkauan, tak hanya ACT tetapi PMI juga telah membangun fasilitas umum berupa 20 Toilet umum serta mushola. tapi yang menjadi permasalahan sampai pada saat ini adalah banyaknya masyarakat yang masih mengeluh terhadap kualitas perumahan yang di bangun sebab banyak bangunan yang tidak sesuai dengan spek yang di tawarkan karena pekerjaan pemukiman ini melalui pihak ketiga dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan dana stimulan untuk pembangunan rumah. Dari data yang ada jumlah total rumah rusak berat 44.014 yang sudah jadi 100 persen baru sebanyak 6.863 dengan presentase 15.59 persen. Sementara untuk rumah rusak sedang yang totalnya 1.758 unit yang sudah jadi 100 persen baru 101 unit atau 3.75 persen. Untuk rumah rusak ringan dari total 4.081 yang sudah jadi sebanyak 316 atau 7.74 persen sedangkan dari perkiraan awal pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2018-2019 dengan prioritas pembangunan rumah dilaksanakan pada tahun 2018 tetapi pada kenyataannya masih jauh dari yang di rencanakan (Ong et al., 2016) mengatakan Rekonstruksi perumahan adalah salah satu kegiatan terpenting pada proses rekonstruksi pascabencana, tanpa membangun kembali rumah, kemampuan rumah tangga untuk melakukan kegiatan normal akan terhambat. Oleh karena itu, memastikan bahwa rumah-rumah dibangun kembali dengan cepat dan aman adalah faktor penting untuk keberhasilan pemulihan dan ketahanan yang lebih besar terhadap risiko bencana di masa depan. Untuk rumah yang berada di kawasan rawan bencana yaitu pada

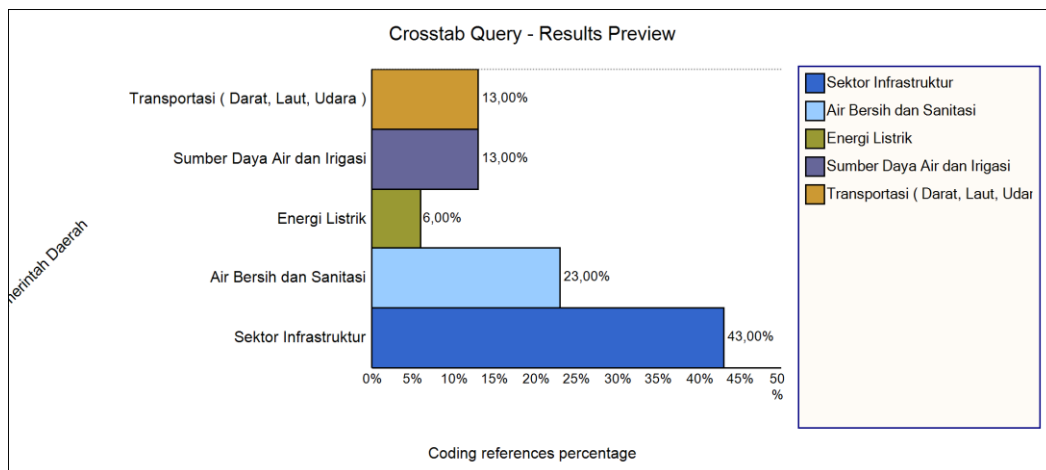
sesar aktif ditetapkan kebijakan relokasi ke tempat yang aman sesuai dengan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui mekanisme relokasi komunal maupun mandiri. Adapun rumah yang berada pada zona aman dapat dilakukan pembangunan kembali/perbaiki secara in-situ (tapak semula). tetapi sampai pada pemulihan saat ini relokasi warga tidak dapat dilakukan karena berbagai pertimbangan akibatnya masyarakat tetap membangun rumah di tempat semula.

4.2.4 Sektor Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam mendukung atau menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat tanpa infrastruktur yang baik aktifitas sosial dan ekonomi menjadi terhambat. Terjadinya bencana gempa yang terjadi pada tahun lalu di Lombok Utara mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan secara tidak langsung berdampak terhadap aliran ekonomi masyarakat setempat, dari laporan yang ada angka kerugian yang di timbulkan mencapai Rp.303.676.794.062. Untuk mendukung perekonomian secara baik perlu di lakukan secara cepat pada sektor Infrastruktur, pemulihan pada sektor Infrastruktur dilakukan melalui sub bidang di antaranya terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor transportasi baik darat laut dan sebagainya, energi, sumber daya air, pos dan komunikasi serta air bersih dan sanitasi. Pada bidang transportasi darat pemerintah melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat guna memudahkan akses baik untuk menyalurkan bantuan ataupun untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, beberapa jembatan penghubung antar wilayah saat

ini juga telah selesai di rekonstruksi bersama kementerian Pekerjaan Umum. Pada bidang Sanitasi dan air bersih pemulihan awal yang dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga terkait ataupun swasta memberikan sumur bor kepada wilayah yang terdampak terutama yang jauh dari jangkauan air dan saat ini rekonstruksi Sumber air telah selesai di kerjakan oleh institusi terkait dalam hal ini PDAM.

Grafik 4.6 Pemulihan Sektor infrastruktur

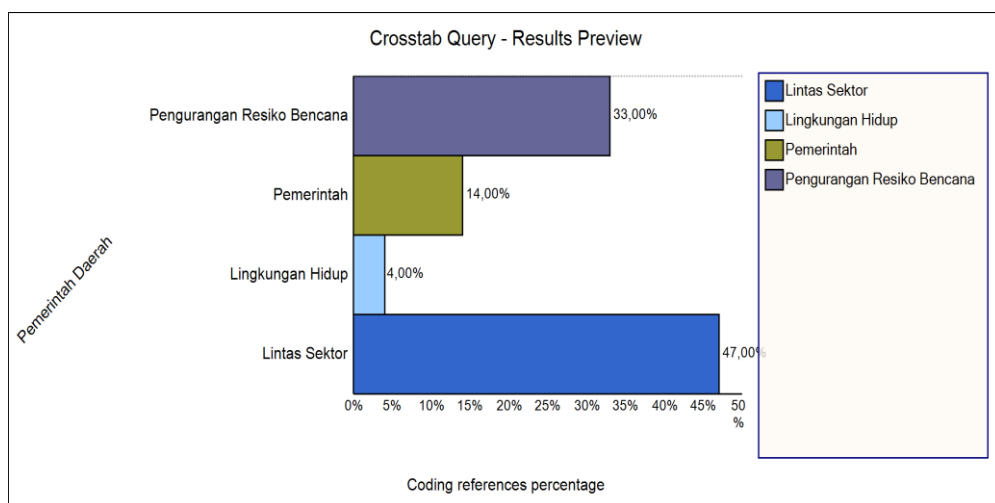


Dari figure hasil Nvivo 12 menunjukkan bahwa bidang Air bersih dan sanitasi merupakan presentase tertinggi karena dari hasil coding yang telah dilakukan Pemulihan di bidang air bersih menjadi prioritas pada saat awal pemulihan pasca bencana ini terlihat dari pemerintah bersama kementerian PU memberikan bantuan berupa sumur bor kepada masyarakat terdampak, tidak hanya dengan pemerintah saja tetapi pemerintah daerah juga banyak mendapat bantuan dari pihak swasta berupa bantuan pipa air serta sumur bor kepada masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan atau wilayah terpencil.

4.2.5 Lintas Sektor

Dampak yang di timbulkan pada lintas sektor berupa kerusakan fisik dari kantor-kantor pemerintah yang ada di Lombok Utara sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas pelayanan kepada masyarakat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana lintas sektor terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Pemerintahan, keamanan ketertiban, Lingkungan Hidup, perbankan dan pengurangan resiko bencana, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 389,195,154,943 diperuntukan terbesar untuk sub sektor pemerintahan yaitu 58,58% mengingat hampir seluruh kantor pemerintahan mengalami kerusakan berat maupun sedang.

Figure 4.7 Pemulihan Lintas Sektor



Dari grafik hasil Nvivo 12 Plus di atas terlihat bahwa 33% prioritas kepada pengurangan resiko bencana, ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana, pengurangan resiko bencana dengan pemulihan lingkungan hidup bisa menjadi satu kesatuan untuk melakukan pemulihan pasca bencana yang terjadi pada masyarakat, dalam hal ini

pemerintah daerah mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup daerah sekitar dengan adanya upaya tersebut pengurangan resiko bencana dimasa yang akan datang bisa di minimalisir, serta pengelolaan lingkungan sekitar harus sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan lokal yang ada di daerah tersebut. Pada bidang pengurangan resiko bencana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah merelokasi warga yang berada di kawasan rawan bencana tinggi ke tempat yang aman sesuai dengan rekomendasi PVMBG karena ada beberapa wilayah berdasarkan hasil kajian di rekomendasikan untk di relokasi sebab ada sekitar 29 Dusun di dataran tinggi dinilai harus direlokasi, pemerintah juga tidak semudah itu untuk melakukan relokasi, dan yang menjadi permasalahan adalah banyak warga yang menolak di relokasi karena beberapa pertimbangan dan juga pemerintah memerlukan kajian yang lebih luas terkait dengan pembiayaan serta penghidupan masyaraka kedepannya, upaya lain yang telah di lakukan oleh pemerintah yaitu sosialisasi dan pelatihan pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta pepemrintah telah membentuk desa siaga bencana di beberapa desa, Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana juah telah dilakukan guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana tinggi selain itu pemerintah juga membentuk sekolah siaga bencana untuk beberapa sekolah di Lombok Utara, siswa di beri pelatihan atau edukasi terkait dengan mitigasi bencana tentu ini menjadi langkah yang baik untuk pemerintah mengurangi resiko bencana untuk yang akan datang.

Pada bidang pemerintahan prioritas awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada pemulihan kembali fungsi pelayanan publik dan sarana prasarana pemerintahan seperti pembangunan tenda-tenda darurat atau kantor sementara untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan kembali secara permanen gedung-gedung pemerintahan yang rusak tentu akan dilakukan secara bertahap mengingat kebutuhan yang di butuhkan oleh pemerintah daerah tidaklah sedikit, seiring dengan menunggu komitmen pemerintah pusat untuk memberikan anggaran lebih kepada pemerintah Lombok Utara. Pemerintah menginginkan untuk pembangunan gedung kantor bupati diharapkan Kemendagri bisa membantu dalam hal pembiayaan.